

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi Kota Palu secara year-on-year (y-on-y) menunjukkan pola yang berfluktuasi selama periode Januari hingga Maret 2026. Pada Januari 2026, inflasi y-on-y tercatat sebesar 4,35 persen dengan IHK 109,21, kemudian meningkat tajam menjadi 5,22 persen pada Februari 2026 dengan IHK 109,93, sebelum akhirnya mengalami perlambatan yang cukup signifikan menjadi 2,64 persen pada Maret 2026 dengan IHK 110,29. Secara month-to-month (m-to-m), inflasi bergerak dari 0,24 persen di Januari, meningkat menjadi 0,66 persen di Februari, lalu melambat menjadi 0,33 persen di Maret. Sementara itu, inflasi year-to-date (y-to-d) terus terakumulasi dari 0,24 persen di Januari, menjadi 0,90 persen di Februari, dan mencapai 1,23 persen di Maret 2026, yang mengindikasikan tekanan harga yang terus berlanjut secara kumulatif meskipun laju bulanannya mulai melandai.

Kelompok pengeluaran yang secara konsisten menjadi pendorong utama inflasi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi y-on-y yang sangat tinggi, yakni 18,05 persen (Januari), 19,29 persen (Februari), dan 17,86 persen (Maret), serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mencatat inflasi 11,43 persen, 14,63 persen, dan 4,91 persen pada periode yang sama. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan tekanan inflasi meskipun trennya menurun dari 3,64 persen di Februari menjadi 0,58 persen di Maret, yang mengindikasikan adanya perbaikan sisi pasokan bahan pangan. Di sisi lain, kelompok pakaian dan alas kaki, perlengkapan rumah tangga, serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan secara konsisten mengalami deflasi sepanjang periode tersebut, sehingga sedikit menahan laju inflasi secara keseluruhan.

Ke depan, terdapat sejumlah risiko yang perlu diwaspadai dalam pengendalian inflasi Kota Palu. Persistensi inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta kelompok perumahan yang masih berada pada level tinggi menjadi sinyal bahwa tekanan dari sisi jasa belum sepenuhnya mereda. Selain itu, potensi kenaikan harga bahan pangan akibat gangguan cuaca atau keterbatasan distribusi logistik ke wilayah Sulawesi Tengah dapat kembali mendorong inflasi kelompok makanan. Faktor musiman seperti hari besar keagamaan dan tahun ajaran baru juga berpotensi memicu kenaikan harga pada kelompok pendidikan, transportasi, dan penyediaan makanan/restoran, sehingga diperlukan langkah antisipatif yang terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan di daerah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan data inflasi Kota Palu periode Januari-Maret 2026, berikut identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah:

1. Persistensi inflasi pada sektor jasa, khususnya kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang secara konsisten mencatat inflasi sangat tinggi di atas 17 persen sepanjang Januari hingga Maret 2026, mengindikasikan lemahnya pengawasan dan pengendalian harga pada sektor jasa di tingkat daerah.
2. Tekanan inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang masih tinggi (11,43 persen di Januari dan 14,63 persen di Februari) mencerminkan adanya permasalahan struktural terkait keterbatasan pasokan energi dan potensi kenaikan tarif layanan dasar yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah.

Ketidakstabilan pasokan dan distribusi bahan pangan, yang tercermin dari volatilitas

3. inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang berfluktuasi dari 2,47 persen (Januari) hingga 3,64 persen (Februari), menunjukkan belum optimalnya sistem distribusi logistik dan ketahanan pangan lokal di Kota Palu.
4. Ketergantungan pasokan barang dari luar daerah menjadikan Kota Palu rentan terhadap gangguan rantai pasok, sehingga setiap hambatan distribusi dan transportasi dapat dengan cepat memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang sulit direspons secara cepat oleh pemerintah daerah.
5. Belum optimalnya koordinasi dan efektivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam melaksanakan langkah-langkah stabilisasi harga, seperti operasi pasar, pemantauan harga secara berkala, dan sinergi kebijakan antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta instansi terkait guna meredam tekanan inflasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan pengendalian inflasi di Kota Palu pada Triwulan I dilakukan melalui strategi 4K sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga

- Penyelenggaraan pasar murah dan subsidi operasional pasar murah berjalan (mobil keliling/GADENOLUMAKO) bagi masyarakat penerima manfaat (PKH);
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Pasar Tani untuk memfasilitasi penjualan langsung dari produsen kepada konsumen.

2. Ketersediaan Pasokan

- Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung pengairan lahan pertanian;
- Pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan pengadaan cadangan pangan pemerintah berbasis sumber daya lokal;
- Pemberian bantuan sarana produksi pertanian, peternakan, dan perikanan (traktor, bibit ternak, alat tangkap nelayan, dll.);
- Pelatihan dan pendampingan kelompok tani serta peningkatan kapasitas penyuluh pertanian;
- Pemberian bantuan sosial (KUBE, sandang, pangan) bagi kelompok rentan dan korban bencana;
- Pemantauan berkala terhadap ketersediaan dan stok pangan di lapangan.

3. Kelancaran Distribusi

- Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk memastikan jalur distribusi barang dari produsen ke pasar tetap lancar.

4. Komunikasi Efektif

- Pembentukan satgas pengawasan penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi, BBM Solar bersubsidi, serta pemantauan stok dan harga bahan pokok pada agen dan distributor;
- Fasilitasi Tanda Daftar Gudang (TDG) untuk mencegah penimbunan barang;
- Dukungan operasional pencatatan harga harian bahan pokok di pasar;

Penyebaran informasi inflasi kepada publik melalui media elektronik, radio, televisi, dan penyediaan layanan internet gratis bagi masyarakat.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi selama Triwulan I

1. Stabilisasi Harga : Kebijakan di TW I sudah cukup responsif dengan mengalokasikan anggaran untuk program Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah guna menekan ekspektasi inflasi di awal tahun;
2. Infrastruktur Distribusi : Program pemeliharaan jalan dan jembatan telah dianggarkan sejak Januari, namun tantangan utama berupa proses administrasi lelang/tender seringkali menyebabkan pengerjaan fisik baru terlaksana secara masif di akhir triwulan;
3. Ketahanan Pangan Mandiri : Pelaksanaan sub-kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan distribusi bibit/benih di TW I mencerminkan upaya jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah;
4. Pengawasan Energi Bersubsidi : Pembentukan Satgas Pengawasan BBM Solar dan LPG 3 Kg di TW I sangat krusial karena kendala distribusi energi bersubsidi sering menjadi pemicu kenaikan biaya logistik barang pokok;
5. Transparansi Data Harga : Sub-kegiatan pencatatan dan penginputan harga bahan pokok harian di pasar utama (Pasar Masomba dan Manonda) berjalan konsisten sejak awal tahun sebagai basis pengambilan keputusan intervensi pasar.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Percepatan Proses Pengadaan (Tender) : Proses lelang untuk kegiatan rehabilitasi jalan dan irigasi harus diselesaikan pada awal Januari agar pengerjaan fisik dapat mendukung kelancaran distribusi pangan dan produksi pertanian sebelum memasuki puncak musim tanam atau cuaca ekstrem di TW I;
2. Optimalisasi Pasar Tani : Meningkatkan frekuensi pelaksanaan Pasar Tani di TW I sebagai langkah strategis memangkas rantai distribusi dari produsen langsung ke konsumen, mengingat biaya distribusi darat cenderung meningkat di awal tahun;
3. Sinkronisasi Bantuan Sosial : Memastikan penyaluran bantuan usaha KUBE dan bantuan alat produksi (traktor/bibit ternak) tepat sasaran di pertengahan TW I untuk menjaga daya beli kelompok rentan di tengah fluktuasi harga awal tahun;
4. Efektivitas Pengawasan Gudang : Memperketat pengawasan melalui Fasilitasi Perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) guna mencegah praktik spekulasi yang menahan stok pangan, terutama saat pasokan dari luar daerah berpotensi terhambat akibat kendala cuaca di awal tahun;
5. Pemanfaatan Layanan Informasi Publik : Memanfaatkan layanan internet gratis dan media komunikasi publik secara lebih masif di TW I untuk menyosialisasikan harga acuan pemerintah, guna mencegah kepanikan belanja (panic buying) di masyarakat.